



Puncak Gunung Marapi di Sumatera Barat pascaerupsi pada Rabu (6/11/2024) pagi.

Antara/HO-Dokumen Pribadi

MENTERI UMKM TEGASKAN

Penghapusan Utang bagi yang Tak Mampu Bayar

JAKARTA (KR) - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, kebijakan penghapusan utang macet hanya berlaku bagi para pelaku UMKM yang benar-benar tidak mampu lagi membayar utangnya.

Maman menjelaskan, penghapusan utang ini khusus diberikan kepada UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan yang mengalami kesulitan akibat bencana alam atau pandemi Covid-19.

Selain itu, kebijakan tersebut hanya berlaku bagi pelaku UMKM yang merupakan nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau bank Himbara, dan telah melewati masa jatuh tempo

selama kurang lebih 10 tahun. "Sehingga, tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong," kata Maman di Jakarta, Rabu (6/11).

Sementara itu, pelaku UMKM lain yang dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak masuk dalam kriteria yang mendapat penghapusan utang. "Saya sampaikan ini, supaya kita

ada kesamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan lebar ke mana-mana," kata Maman.

Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan piutang macet bagi UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Prabowo menekankan, kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indone-

sia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Presiden.

Kebijakan ini meliputi penghapusan utang bagi UMKM pada tiga sektor, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan; serta industri mode/busana dan kuliner. Presiden Prabowo menjelaskan, sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," katanya.

(Ant/San)

GUNUNG MARAPI KEMBALI ERUPSI

Kota Bukittinggi Dihujani Abu Vulkanik

BUKITTINGGI (KR) - Gunung Marapi, Sumatera Barat kembali erupsi pada Rabu (6/11) pagi. Hujan abu vulkanik sempat menghujani daerah Utara dan Timur Laut termasuk Kota Bukittinggi.

"Aktivitas pagi sempat terhalang dengan turunnya hujan abu. Apalagi kami pengendara sepeda motor yang mengantarkan anak ke sekolah," kata seorang warga Bukittinggi, Sri Nurhayati (37).

Warga terpaksa memakai masker pelindung dengan kendaraan mereka yang tampak memutih terkena abu vulkanik. Sementara di daerah kaki Pegunungan Marapi, Bukit Batabuah, warga mengaku erupsi diiringi suara dentuman yang terdengar cukup jelas.

Wal nagari atau Kepala Desa Sungai Pua Ade Firmansyah mengatakan, di sebagian wilayah Sungai Pua sempat terjadi hujan abu tipis. "Tadi memang sempat terjadi hujan abu tipis, tapi sekarang bisa dikatakan tidak ada, mungkin karena arah anginnya sudah berubah," ungkap Ade.

Ade juga mengatakan, dirinya tidak terlalu mendengar letusan yang terjadi pagi tadi. Sementara itu, aktivitas masyarakat masih berjalan normal seperti biasanya.

"Sepertinya tadi tidak terlalu keras suaranya, saya sendiri tidak mendengarnya. Masyarakat pun seperti biasa saja, masih beraktivitas normal," ujarnya.

Menurut Petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Bukittinggi Ahmad Rifandi, letusan pertama pada pukul 05.44 WIB dengan ketinggian kolom abu erupsi tidak teramati karena tertutup awan dari arah pos. "Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi 4 menit 35 detik," jelasnya.

Sementara itu berdasarkan laporan dari BMKG, arah angin di sekitaran Gunung Marapi mengarah ke Timur Laut atau ke Tanah Datar. Saat ini Gunung Marapi berada pada Status Level II (Waspada) dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pendaki/pengunjung/wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat erupsi (Kawah Verbeek) Gunung Marapi.

Masyarakat yang bermukim di sekitar lembah/aliran/bantaran sungai-sungai yang berhulu di puncak Marapi agar selalu mewaspada potensi ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi.

(Ant/San)-d

PENANGANAN KASUS TOM LEMBONG

Komisi III Desak Kejagung Transparan

JAKARTA (KR) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepada aparat penegak hukum untuk menyikapi situasi yang terjadi soal kasus yang menjerat Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong agar publik tidak menduga-duga atas kasus tersebut. Kasus tersebut diharapkan menjadi terang-benderang di hadapan publik dan terlihat bahwa tidak ada intervensi apapun, karena publik pada umumnya belum mengerti terhadap kasus yang menjerat Tom. "Kasihani nanti pemerintah dianggapnya wah ini ada main-main misalnya gitu. Kan kita nggak berharap begitu. Kasihan kalau pemerintah dituduh-tuduh yang belum pasti dengan kepastiannya," kata Sahroni setelah rapat Komisi III DPR RI bersama PPA TK di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (6/11).

Menurutnya, Kejaksaan Agung yang menangani kasus tersebut ju-

ga perlu transparan. Jangan sampai ada seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi dugaan-dugaannya tidak terbukti. "Nah kita berharap ini menjadi penjerihan di ruang publik, dan publik tidak bertanya-tanya ada apa sebenarnya," kata Sahroni.

Sebelumnya (29/10), Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tahun 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong, sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2015—2016. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qodar menjelaskan keterlibatan Tom Lembong dalam kasus itu bermula ketika pada tahun 2015, dalam rapat koordinasi antarkementerian disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu impor gula.

(Ant/Has)-f

UNTUK PROGRAM PRIORITAS

Kabinet Merah Putih Lakukan Efisiensi

JAKARTA (KR) - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan dalam sidang kabinet paripurna, seluruh jajaran di Kabinet Merah Putih (KMP) perlu melakukan efisiensi untuk tugas-tugas dinas demi menjalankan program-program prioritas yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

"Presiden menyatakan untuk seluruh kementerian lembaga dan badan menjalankan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas keseharian dan dalam menyelenggarakan kegiatan mereka, termasuk misalnya efisiensi dalam perjalanan dinas," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat memberikan keterangan usai Sidang Kabinet Paripurna selesai di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (6/11).

Hasan lebih lanjut mengatakan, Presiden Prabowo memberikan ilustrasi, bahwa apabila perjalanan dinas dilakukan secara tepat sasaran, akan ada anggaran yang bisa dihemat. Bahkan, Presiden mengata-

kan, anggaran tersebut bisa dijamin menjadi jaminan perumahan rakyat apabila langkah efisiensi dilakukan secara benar.

Tidak hanya perjalanan dinas, Presiden Prabowo mengatakan, arahan efisiensi anggaran juga bisa dilakukan dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dengan efisiensi untuk acara-acara yang sifatnya selebrasi dalam kedinasan, diharapkan anggaran yang dihemat dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan.

"Ini karena kita sekarang mau fokus untuk kesejahteraan rakyat, mau fokus untuk ketahanan pangan, ketahanan energi dan untuk menyelenggarakan makan bergizi gratis," kata Hasan.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan menteri dan kepala-kepala lembaga negara lainnya dalam sidang kabinet paripurna untuk membahas lawatannya ke luar negeri hingga menghadiri acara G7.

(Ant)-d

GUBERNUR KALSEL MENGHILANG

KPK Terbitkan Surat Penangkapan

JAKARTA (KR) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat penangkapan terhadap Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (SHB). Surat penangkapan tersebut terkait penyidikan dugaan suap pengadaan barang dan jasa tiga proyek pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan. "KPK juga telah menerbitkan surat perintah penangkapan dan larangan bepergian ke luar negeri atas nama Sahbirin Noor per tanggal 07 Oktober 2024," kata Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu (6/11).

Menurut Budi, saat ini Sahbirin Noor belum diketahui keberadaannya dan yang bersangkutan juga tidak menjalankan tugasnya sebagai gubernur Kalimantan Selatan. "Sampai saat ini SHB tidak dalam status tahanan, namun SHB selaku gubernur Kalimantan Selatan tidak melakukan aktivitas sehari-hari di kantor sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya," ujarnya.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (SHB) saat ini tidak diketahui keberadaannya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa terkait tiga proyek pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Sahbirin ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya.

KPK telah melakukan pencarian terhadap Sahbirin Noor ke sejumlah lokasi, namun hingga saat ini yang bersangkutan belum diketahui keberadaannya. "SHB tidak diketahui keberadaannya, meskipun KPK telah melakukan upaya pencarian ke beberapa lokasi," ujarnya.

Sahbirin juga tidak diketahui keberadaannya, bahkan saat sidang praperadilannya berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (5/11).

(Ant/Has)-f

KASUS SUAP IBU RONALD TANNUR

Hubungan Zarof dan Tiga Hakim Didalami

JAKARTA (KR) - Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung mendalami hubungan tersangka Zarof Ricar dengan tiga tersangka oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yakni ED (Erintuah Damanik), HH (Heru Hanindy), dan M (Mangapul) dalam kasus vonis bebas Ronald Tannur. Empat orang itu diperiksa sebagai saksi untuk mendalami keterkaitan mereka dalam perkara dugaan suap yang menjerat ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja (MW).

"Sejak tadi pagi menjelang siang benar bahwa penyidik pada jajaran Jampidsus melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tiga oknum hakim yang sudah berstatus tersangka dan juga terhadap ZR (Zarof Ricar) yang juga statusnya sudah menjadi tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (6/11).

Dijelaskan, Meirizka selaku ibu Ronald Tannur meminta tersangka LR yang merupakan seorang pengacara untuk menjadi penasihat hukum bagi anaknya dalam persidangan. Pada prosesnya, LR mengatakan kepada Meirizka bahwa ada biaya dan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk memuluskan dijatuhkannya vonis bebas.

Dalam menjalankan rencana itu, LR meminta kepada Zarof Ricar selaku mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) agar diperkenalkan kepada seorang pejabat di PN Surabaya yang dapat memilih majelis hakim untuk menyidangkan perkara Ronald Tannur. Atas informasi tersebut, kata Harli, penyidikan pada hari ini pun difokuskan untuk mendalami hubungan Zarof Ricar selaku terduga perantara LR dengan tiga hakim PN Surabaya.

(Ant/Has)-f



Antara/Aditya Pradana Putra

BERI MAKAN TERNAK: Seorang pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki pulang ke rumahnya untuk memberi makan ternaknya di Hokeng, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Rabu (6/11/2024). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) meminta masyarakat sekitar untuk tidak mendekati kawah dalam radius 7 km dan mewaspada potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Lewotobi Laki-Laki.